DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

Oleh:
Meri Apriya
Meriapria12345@gmail.com
UIN Raden Intan Lampung

Received:	Revised:	Aproved:
25-05-2022	18-06-2022	23-06-2022

Abstract (English)

Financing is the largest income of Islamic banks, but at the same time is the biggest source of business operation risk. Corona / Covid-19 virus related to financing in Islamic banks not only reduces the income of Islamic banks but the economic sector of a country. This study aims to analyze the impact of Covid -19 on financing in Islamic banks not only reduce the income of Islamic banks but the economic sector of a country. This study aims to analyze the impact of Covid -19 on financing in Islamic banks, not only reduce the level of income of Islamic banks, but also refers to the decline in the economic level of a country. This study aims to analyze the impact of Covid-19 on financing in Islamic banks. The method used in this research is quantitative research methods with case study design. The case study method is a learning design based on the unit level of education. This method takes the form of an explanation of a particular problem, event or situation, then students are tasked with finding alternative solutions, then this method can also be used to develop critical thinking and find new solutions from a topic being solved. The independent variable is co-19 impact. The dependent variable is Islamic bank financing.

Keywords *: Covid-10, Islamic Bank, Financing*

Abstrak (Indonesia)

Pembiyaan adalah pendapatan bank syariah yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber resiko operasi bisnis yang terbesar. Terkait virus Corona / Covid-19 terhadap pembiyaan di bank syariah bukan hanya menurunkan pendapatan bank syariah melainkan sector perekonomian suatu Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak Covid -19 terhadap pembiyaan di bank syariah, bukan hanya menurunkan tingkat pendapatan bank syariah, tetapi mengacu juga kepada turunnya tingkat perekonomian suatu Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak Covid-19 terhadap

pembiayaan di bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan desain studi kasus. Metode studi kasus adalah suatu desain pembelajaran berbasis tingkat satuan pendidikan metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi tertentu, kemudian mahasiswa ditugasi mencari alternatif pemecahannya kemudian metode ini dapat juga digunakan untuk mengembangkan berpikir kritis dan menemukan solusi baru dari suatu topik yang dipecahkan. Variabel indepennya dampak covid-19. Variabel dependennya pembiyaan bank syariah

Kata Kunci: *Covid-19, Bank Syariah, Pembiayaan*

A. Pendahuluan

Dunia sedang dihebohkan dengan sebuah wabah yang sangat berbahaya yaitu covid-19, yang biasa orang menyebutnya virus corona, virus ini pertama kali muncul di Wuhan, lalu menyebar keseluruh dunia tak terkecuali indonesia. Indonesia pertama kali mendapati virus ini sampai dindoneisa yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 yang menimpa 2 warga depok, jawa barat[1].

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat Negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.

Dengan kedatangan virus ini tak mungkin tidak membawa dampak, salah satu dampak yang dirasakan sekarang ialah, sekolah

[1]Kompas.com

dirumah, kerja dirumah atau *work from home*, belum lagi mulai diterapkannya social distancing hingga *phisic distancing*, yang pasti akan memepengaruhi keadaan ekonomi indonesia pula. Saat seseorang kerja dari rumah, sekolah dari rumah pasti akan membawa dampak perekomoian kepada ojek online, jasa angkutan umum, armada bus, hingga penerbangan sekalipun.

Setelah virus ini merajalela kemudian telah mempengaruhi semuanya juga mempengaruhi pemerintah, dengan begitu pemerintah menyepakati melakukan tindakan Refokusing dan realokasi anggaran belanja diterapkan pemerintah untuk penangan pandemik ini dengan melakukan penghematan belanja. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DAD) dengan harapan kepala daerah dapat mengoptimalkan langkah tersebut untuk pencegahan Covid-19, sehingga akan terjadi penghematan sebesar Rp. 190 Trilliun dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp. 54,6 Trilliun[2]. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan kebijakan non-fiskal.Penyederhanaan larangan terbatas ekspor dan impor, serta percepatan layanan ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem (NLE) diterapkan demi menjaga ketersediaan barang yang dibutuhkan.[3]

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan dengan menurunkan BI 7- Day Repo Rate pada Februari dan Maret masing-masing sebesar 25 bps untuk menjaga konsumsi masyarakat ditengah wabah ini dan mengendalikan tingkat inflasi, yang telah mencapai 2,98 Persen Per

[2]Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2020. Pemerintah Pusat Koordinasikan Realokasi dan Anggaran Daerah untuk Dukung Penanganan Covid-19 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaranpers/siaran-pers-pemerintah-pusat-koordinasikan-realokasi-dan-anggaran-daerah-untuk-dukungpenanganan-covid-19/.Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

[3]Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2020. Jaring Pengaman Sosial Disiapkan untuk atasi Dampak Covid-19.https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_kucurkan_rp4051_triliun_untuk_tangani_dampak_covid _19
Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Februari 2020 [4]. BI juga menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Valas untuk bank umum konvensional dari semula 8 Persen menjadi 4 Persen, meningkatkan triple intervention di pasar spot, DNDF, melakukan pembelian SBN di pasar sekunder, menguatkan likuiditas rupiah dengan memperpanjang tenor repo SBN dan lelang tiap hari, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan menggunakan bank kustodi global dan domestic untuk kegiatan investasi. Begitu juga dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit hingga Rp. 10 Milliar. Berdasarkan ketepatan membayar.[5]Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi nasional. Diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan mengalami kenaikan, setelah pada tahun sebelumnya terjadi penurunan. Peningkatan diharapkan terjadi setelah serangan pandemik ini dan pemerintah dapat optimis karena sepanjang tahun 2017 sampai 2018 sebelumnya pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat.[6]

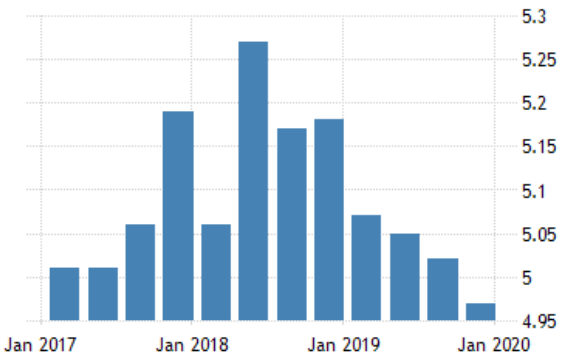

sumber: Pertumbuhan PDB (y-on-y) 2020

[4]Bank Indonesia. 2020. Inflasi. https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx Diakses pada 31 Maret 2020.

[5]Bank Indonesia. Siaran Pers. 2020, https://www.bi.go.id/id/ruangmedia/siaran-pers/Pages/sp_222620.aspx
Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

[6]International Monetary Fund .https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/IDN?zoom=IDN&highlight=IDN. Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Dari gambaran tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia sedikit menurun menjadi 4,97 persen pada kuartal keempat 2019 dari 5,02 persen pada periode tiga bulan sebelumnya, sedikit di bawah konsensus pasar 5,04 persen. Itu adalah laju ekspansi terlemah sejak kuartal keempat 2016, karena kenaikan konsumsi rumah tangga yang lebih lemah (4,97 persen vs 5,01 persen pada Q3), investasi tetap (4,06 persen vs 4,21 persen) dan pengeluaran pemerintah (0,48 persen vs 0,98 persen) . Selain itu, ekspor turun 0,39 persen (vs 0,10 persen pada Q3) dan impor turun lebih cepat 8,05 persen (vs -8,30 persen). Di sisi produksi, pertumbuhan output melambat terutama untuk manufaktur, pertambangan, perdagangan eceran dan grosir, kegiatan real estat, pendidikan dan layanan sosial. Untuk 2019, ekonomi tumbuh 5,02 persen, di bawah ekspektasi pasar 5,03 persen dan target pemerintah 5,3 persen. Itu adalah pertumbuhan tahunan terlemah sejak 2015. Bank Indonesia memperkirakan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 5,3 persen di tahun 2020.

B. Pembahasan

1) Kajian Teori

a. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan

usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prisnsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).[7]

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah.Menurut pasal 3 undang-undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[8]

c. Produk-Produk Bank Syariah

Pendapatan bank syariah tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari : 1). Biaya administrasi terhadap penyaluran kredit al-qardh. 2). Mark up terhadap penyaluran kredit al-

[7] Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), hlm. 26

[8]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 33

murabahah dan al-ba'i bi saman 'ajil. 3). Bagi hasil dari penyaluran kredit-kredit al-mudharabah dan al-musyarakah. 4). Fee terhadap penggunaan jasa-jasa perbankan umumnya seperti alkafalah (jaminan bank), al-hiwalah (pengalihan utang), al-jialah (pelayanan khusus), alwakalah (penerbitan letter of credit) dan sebagainya.

Dalam operasionalnya, bank syariah memberikan jasa kepada penyandang dana dengan cara menerima deposito dari mereka melalui beberapa tipe rekening, yaitu rekening koran, rekening tabungan, rekening investasiumum, dan rekening investasi khusus.[9]Musyarakah (Kredit Modal Usaha Bersama),Mudarabah (Kredit Modal Usaha), Murabahah.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

Secara umum pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Bank Syariah suatulembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.[10] Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalani hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak

[9]Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, (Jakarta: PN. Alvabet, 1999), hlm. 30.

[10]Ensiklopedia Bank syariah

sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah (trust financing).

Dalam hal ini Bank syariah mempunyai dua peran utama yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Bank syariah sebagai manajer investasi melakukan penghimpunan dana dari para investor/ nasabah dengan prinsip wadiah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa.

Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan hutang), rahn (jaminan utang/gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing) dan lain-lain.[11] Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk wadiah yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyadah, jika dikaitkan bahwasanya dari penelitian.

Adapun faktor-faktor input dan output yang digunakan dalam mengukur efisiensi pembiayaan pada bank syariah dijelaskan oleh Karsinah dan Cahya(2014:6) adalah total

[11]Afif.Amirullah. April 2014. *Efesiensi Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal *Of Economics and Policy*. Vol.7(2)

simpanan, aset tetap, dan beban operasional sebagai faktor input serta pendapatan yang didapatkan dari pembiayaan dan laba operasional sebagai variabel output.

Beberapa hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah baik faktor internal maupun eksternal telah dilakukan seperti pada beberapa penelitian berikut ini: Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank In Indonesia 235 Dari aspek internal, Adisaputra (2012) menemukan hasil bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap NPL. Altunbas et al. (2000), Hughes and Mester (1993) dan Girardone et al. (2004) menemukan bahwa ada hubungan negatif antara bank yang tidak efisien (BOPO) dengan non performing loan. Begitupun Misra dan Dhal (2009) dalam Diyanti (2012) menemukan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap NPL.Faktor lainnya yaitu ukuran bank, pada penelitian Misra dan Dhal (2010) mengemukakan bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap NPL.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ranjan dan Dhal (2003) dalam Kurnia (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara ukuran dengan NPL.Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari sisi eksternal yang direpresentasikan dengan Gross Domestic Product (GDP) dan inflasi.

Salas dan Saurina (2002) menunjukkan adanya hubungan antara GDP dengan NPL.Hasil penelitian itu ditegaskan oleh Jimenez dan Saurina (2005) bahwa NPL dipengaruhi oleh GDP. Wu, et. al. (2003) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa GDP berpengaruh negatif signifikan

terhadap kredit bermasalah.

Sementara dalam penitian Rahmawulan (2008), Ahmed (2006) menunjukkan hal sebaliknya, GDP berpengaruh positif signifikan terhadap kredit bermasalah.Lain lagi penelitian Soebagia (2005), Nasution dan Williasih (2007), dalam penelitian mereka diketahui bahwa GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah. Sedangkan penelitian seperti penelitian oleh Soebagio (2005), Rahmawulan (2008), dan Faiz (2010), diketahui bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kredit bermasalah. Sedangkan dalam penelitian Wu, et al. (2003) dan Ihsan (2011) dinyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara inflasi terhadap kredit bermasalah.

Warjiyo (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh penawaran kredit perbankan, penawaran dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari DPK, persepsi bank dari usaha debitur, dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau CAR (Capital Adequacy Ratio), jumlah kredit macet atau NPL *(Non Performing Loan),* dan LDR *(Loan to Deposit Ratio)*.Dengan terjadi dampak covid-19 seperti itu terdapat 6 bank yang memberlakukan kebijakan relaksasi. Mereka adalah Bank BJB, Bank BPD Bali, Bank BPD NTT, Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, dan Bank Jateng.

2) Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Metode studi kasus adalah suatu desain pembelajaran berbasis tingkat satuan pendidikan metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi tertentu, kemudian mahasiswa ditugasi mencari alternatif pemecahannya kemudian metode ini dapat juga digunakan untuk mengembangkan berpikir kritis dan menemukan solusi baru dari suatu topik yang dipecahkan. (Yamin, 2007: 15)Objek kajian empiris untuk melihat gambaran relaksasi Bank Syariah dalam penundaan pembayaran angsuran dan/atau pemberian keringanan pembayaran sewa atau margin dengan kurun waktu dan syarat-syarat yang disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah.Variabel indepennya dampak Covid-19.Variabel dependennya pembiyaan bank syariah.

3) Hasil Penelitian

Perbankan syariah tengah mencermati perkembangan dari dampak virus corona terhadap pembiayaan. Optimisme bank di awal tahun dengan memasang target pembiayaan cukup tinggi perlahan meredup lantaran wabah corona telah memukul berbagai sektor ekonomi.

Sejumlah bank syariah kemungkinan besar akan memangkas target pembiayaan tahun ini menjadi lebih konservatif. PT Bank BNI Syariah misalnya sebelumnya memasang target pembiayaan tumbuh 15%-17% tahun ini. Namun, penyebaran virus corona yang telah memukul aktivitas ekonomi membuat bank ini memilih untuk lebih berhati-hati dalam mengelola portofolio pembiayaan eksisting dan melakukan ekspansi.

Contoh salah satunya terdapat di BNI Syariah juga yang hanya tumbuh 9,69%. Padahal periode yang sama tahun lalu masih tumbuh dua digit. Sejauh ini dampak virus corona terhadap kualitas aset bank ini memang belum terasa, secara umum dampak

virus corona memang bikin permintaan kredit melambat. Tetapi menurutnya tidak semua sektor terpuruk, bahkan ada juga yang tumbuh yakni industri terkait disinfektan, masker, dan kertas. "Untuk NPF juga tidak berdampak, masih terjaga di level 0,6%,"

Dalam studi lapangan yang didapat bahwasanya Gubernur BI (Perry Warjiyo) secara umum dalam konteks menegaskan mitigasi efek wabah virus korona, BI pangkas GWM Valas. Dalam hal langkah koordinasi dan kebijakan BI menempuh beberapa kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas moneter dan masa keuangan dalam memitigasi risiko Covid-19, kebijakannya meliputi:

- Peningkatan intensitas tripel intervensi untuk menjaga nilai tukar rupiah
- Menurunkan GWM Valuta Asing bank umum konvensional dari 8% menjadi 4% dari DBK (Berlaku 16 Maret 2020)
- Menurunkan GWM Rupiah sebesar 50 bps
- Memperluas Underlying Hedging transaksi bagi investor asing
- BI menegaskan investasi global dapat menggunakan Bank Kustodi global dalam melakukan kegiatan investasi

Pada saat sebelumnya di dunia perbankan terdapat 3 pilar perhitungan kolektibilitas perbankan, yang mana ada ketepatan pembayaran pokok dan bunga, prospek usaha debitur, dan kondisi keuangan debitur, tetapi pada saat ini hanya poin yang pertama saja yaitu hanya ketepatan pembayaran pokok dan bunga saja, tetapi kebijakan ini hanya untuk pinjaman pada bank hanya bisa di bawah 10 Miliar saja.

Secara detail wabah Coronavirus novel 2019 (SARS-CoV-2)

epidemi, yang pertama kali dilaporkan pada Desember 2019 di Wuhan, Cina, dan telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia, dapat berkembang menjadi pandemi yang terkait dengan morbiditas dan mortalitas yang substansial. Berlangsungnya virus tersebut ke Indonesia, dalam tentang pembatasan sosial di Indonesia akibat virus corona. Pembahasan dalam tulisan ini memfokuskan berdasarkan sudut pandang pembiayaan di bank syariah.

4) Pembahasan

Berdasarkan pendapat dan kasus-kasus yang telah ada bahwasanya pemerintah mengambil langkah pembatasan sosial dikarenakan faktor ekonomi. Kenapa bisa faktor ekonomi karena ketika lockdown yang diterapkan, maka tentu saja dapat berimbas pada aspek tidak adanya pendapatan negara di bidang pariwisata, tidak adanya pendapatan negara dari perusahaan, tidak adanya pendapatan negara di bidang ekspor, pemerintah mengeluarkan uang dalam membiayai kehidupan rakyat, dan stabilitas nilai tukar rupiah di pasar tunai.

a. Tidak adanya pendapatan negara di bidang pariwisata

   Pada aspek pertama ini, banyak pihak yang mengkritik pemerintah karena ketika munculnya virus corona. Pemerintah Indonesia justru semakin memberi kesempatan kepada wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Aspek pertama ini merupakan salah satu aspek yang membuat Indonesia seperti tidak berdaya menghadapi virus corona.

b. Tidak adanya pendapatan negara dari perusahaan

   Langkah lockdown yang diambil, maka otomatis perusahaan tidak akan bergerak atau tidak akan beroperasi. Kalau itu

terjadi, maka tidak adanya pendapatan perusahaan, ketika tidak adanya pendapatan perusahaan, maka tidak ada uang untuk bayar pajak kepada pemerintah. Ketika tidak ada pajak, maka tentunya pemerintah Indonesia tidak akan mendapatkan hasil yang bisa menutup anggaran yang sangat besar dalam mengelola negara. Secara sekilas, langkah pemerintah Indonesia ini tidak ada yang salah bahkan sudah tepat.

c. Tidak adanya pendapatan negara di bidang ekspor

   Pemerintah Indonesia tidak melakukan lockdown tapi pembatasan sosial, itu diakibatkan berkurangnya ekspor barang Indonesia ke luar negeri. Karena ketika lockdown maka orang yang bekerja pasti aktivitasnya berkurang. Ketika berkurang, maka hasil kerjanya juga berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Apalagi ketika hasil kerja yang dimaksud berkaitan dengan barang yang akan diekspor. Ketika itu terjadi, maka tentunya negara sebagai tujuan ekspor akan beralih kepada negara yang lain. Beralih yang dimaksud yakni mengimpor barang dari negara lain. Ketika ekspor barang berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, maka otomatis pajak barang ekspor tidak akan didapatkan oleh pemerintah Indonesia.

d. Pemerintah mengeluarkan uang dalam membiayai kehidupan rakyat

   Ketika aktivitas Indonesia dihentikan selama 1 bulan atau lebih dan ketika aktivitas tersebut diawasi secara ketat oleh aparat negara, maka perekonomian masyarakat terhenti. Ketika berhenti, maka biaya kehidupan keseharian masyarakat otomatis tidak ada. Ketika kondisi tersebut muncul, maka yang bertanggung jawab membiayai kehidupan masyarakat tersebut

adalah pemerintah Indonesia. Memang dari berbagai media, Menteri Keuangan telah menginformasikan bahwa kementerian tersebut telah mengantisipasi virus corona tersebut dengan cara menganggarkannya di keuangan negara. Artinya ketika Indonesia sudah status waspada tingkat satu terhadap wabah corona, maka uang yang akan digunakan untuk itu telah disiapkan oleh negara.

e. Stabilitas nilai tukar rupiah di pasar tunai

Domestic Nondelivery Forward (DNDF), ataupun pembelian surat berharga negara (SBN) dari pasar sekunder. Masalah kompleks karena ini adalah masalah manusia yang berdampak pada ekonomi dan berisiko pada sektor keuangan. Semua harus bersatu memitigasi pandemi dengan berikhtiar sekuat tenaga. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), Selasa, nilai tukar rupiah Rp 16.410 per dollar AS. Sementara pada penutupan pasar tunai, nilai tukar Rp 16.125 per dollar AS.

Perusahaan menargetkan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) di bawah lima persen. Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Berdasarkan POJK Stimulus Perekonomian Nasional, bank yang diwajibkan merelaksasi pinjaman debitur UMKM yang terkendala cicilan dan pelunasan adalah bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) bank, bank perkreditan rakyat (BPR), dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, boleh dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, penurunan suku bunga,

perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Fadjroel menyebut, debitur juga baru mendapatkan relaksasi setelah melalui tiga proses. Pertama, debitur wajib mengajukan restrukturisasi ke bank secara online. Proses kedua, bank akan melakukan penilaian (assessment) untuk menentukan debitur terdampak/tidak terdampak, baik langsung/tidak langsung, didasari historis pembiayaan dan kondisi terkini lainnya. Proses ketiga, bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur dari hasil analisa.

Realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Analisa pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (feasible) dalam arti bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan, jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya serta tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank syariah dan nasabah. Dalam menganalisa pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan

kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah.

Terjadinya pandemi COVID-19 yang menyatakan penurunan ekonomi global serta melemahnya sektor perbankan di Indonesia. Di bank syariah besar rasio yang disepakati saat awal akad adalah dalam sistem bagi hasil, ini yang membedakan dengan bank konvensional. "Suku bunga di bank konvensional bisa berubah sesuai suku bunga di Bank Indonesia (BI). Sedangkan di bank syariah diterapkan bagi hasil sesuai kesepakatan porsi di awal akad dan akan dijalankan hingga akhir perjanjian. Besar laba bank syariah bergantung pada keuntungan yang didapat dari pihak bank, "rasionya akan meningkat seiring peningkatan keuntungan bank syariah itu." Hal ini jelas berbeda dengan bank konvensional, bunga yang didapat nasabah bank konvensional persentasenya tetap meski bank sedang mendapatkan keuntungan tinggi ataupun rendah. Jika dalam kondisi ekonomi yang bagus bank syariah memperoleh keuntungan yang besar dari penyaluran pembiayaan karena nasabahnya usahanya juga pada bagus maka nasabah penabung juga akan mendapatkan keuntungan yang besar juga karena menggunakan sistem bagi hasil. Sebaliknya apabila kondisi ekonomi kurang bagus seperti pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan para nasabah pembiayaan mengalami penurunan pendapatan maka kewajiban bank dalam memberikan bagi hasil kepada nasabah penabung akan menyesuaikan.

C. Kesimpulan

Kedatangan Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi sektor pembiayaan bank syariah. Bahkan bukan hanya bidang pembiayaan bank syariah, covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penurunan ekonomi global,

sektor industri, pariwisata, biro perjalanan, dan salah satunya ialah sektor perbankan terkhusus perbankan syariah di Indonesia.

Covid-19 membuat sejumlah bank-bank memangkas target pembiayaan menjadi lebih konservatif, salah satunya ialah Bank BNI Syariah memasang target pembiayaan 15% hingga 17% ditahun 2020 ini, secara langsung maupun tidak langsung pengaruh covid akan membuat permintaan pembiayaan melambat bahkan dapat menurun dengan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. 2020. Inflasi. https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx. Diakses pada 31 Maret 2020.

Bank Indonesia. 2020. Siaran Pers. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaranpers/Pages/sp_222620.aspx. Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Afif Amirullah (2014). *Efesiensi Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal OfEconomics and Policy.Vol.7 (2).

Dimas Wiradita (2020). *BI Langkah mitigasi penyebaran covid-19*.Kompas

Maulidiyah, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 4 April 2016: 333-345.

Devi Fitria Wulandari (2019). Pelaksanaan Sistem Risk and Return pada Bank Konvensional dan Bank Syariah . Jurnal Ekonomi Efektif.Vol.1 (2)

Hikmah Maulidiyah. Nisful Laila (2016).Membandingkan Efesiensi Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan metode (DEA). Vol.3 (4)

Antonio, Moh. Syafi'i. "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Ascarya, dan Diana Yumanita. 2005. "Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia". Working Paper. WP/01/PPSK/05.Bank Indonesia

Budiono,Kholis. "Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Zakat PDB dan Inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia".Jurnal.2009.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008

Dama, Himawan Yudistira. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto" (PDRB)

Bhat A.Thariq,Goniewicz, Thanavala. SARS-CoV-2 *Load in Upper Resiratory Specimesns of infected patiens*.2020

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2020. Jaring Pengaman Sosial Disiapkan untuk atasi Dampak Covid-19. https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_kucurkan_rp4 051_triliun_untuk_tangani_dampak_covid _19.Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO /IDN?zoom=IDN&highlight=IDN. Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018).

© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).